

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK BAGI MAHASISWA FISIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU GUNA MEMBANGUN BUDAYA DEMOKRATIS

M. HENDRAWAN DAN SUSIYANTO
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan politik di kalangan mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam upaya membangun budaya demokratis di lingkungan mahasiswa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari mahasiswa FISIP yang aktif dalam kegiatan akademik, organisasi mahasiswa (ORMAWA), dan organisasi kepemudaan internal Muhammadiyah (IMM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pendidikan politik di FISIP UMB berlangsung melalui dua jalur utama, yaitu jalur akademik dan non-akademik. Pada jalur akademik, pendidikan politik diberikan melalui proses perkuliahan, diskusi ilmiah, dan seminar yang mengaitkan teori politik dengan kondisi sosial-politik aktual. Sementara itu, pada jalur non-akademik, pendidikan politik diwujudkan melalui aktivitas organisasi mahasiswa seperti BEM dan DPM serta kegiatan kaderisasi di IMM yang memberikan pengalaman langsung dalam praktik demokrasi, seperti musyawarah, pengambilan keputusan, dan penyampaian aspirasi. Jika dianalisis menggunakan teori konstruksi sosial Peter L. Berger, proses pembentukan budaya demokratis mahasiswa terjadi melalui tiga tahapan, yaitu eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Eksternalisasi terlihat ketika nilai-nilai demokrasi diperkenalkan melalui kegiatan akademik dan organisasi. Objektivasi terjadi ketika nilai-nilai tersebut menjadi kebiasaan dan norma dalam kehidupan mahasiswa di kampus. Selanjutnya, internalisasi terjadi ketika mahasiswa menyerap nilai demokrasi tersebut ke dalam kesadaran diri sehingga membentuk sikap kritis, partisipatif, dan bertanggung jawab. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa tantangan dalam implementasi pendidikan politik, antara lain masih kurangnya diskusi interaktif dalam perkuliahan, dinamika organisasi yang kadang dipengaruhi oleh ego personal, serta belum meratanya internalisasi nilai demokrasi di kalangan mahasiswa. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan politik di FISIP UMB memiliki peran penting dalam membangun budaya demokratis mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan penguatan metode pembelajaran yang lebih partisipatif serta pengembangan ruang-ruang diskusi dan organisasi yang mampu mendorong mahasiswa untuk lebih aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Kata Kunci : pendidikan politik, mahasiswa, budaya demokratis, FISIP UMB

The Implementation of Political Education among FISIPOL UMB Students to Build a Democratic Culture

M. HENDRAWAN DAN SUSIYANTO
Universitas Muhammadiyah Bengkulu

ABSTRACT

This research is grounded in the importance of political education in shaping students' political awareness as young people who hold a strategic role in democratic life. Students are required not only to understand political concepts theoretically, but also to be able to apply democratic values in social and organizational life on campus. This research aims to examine how political education is implemented among students of FISIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu, and to identify the challenges faced in building a democratic culture within the student community. The research employs a qualitative approach with a descriptive method, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The informants consist of FISIP students who are active in academic activities, student organizations (ORMAWA), and Muhammadiyah's internal youth organization (IMM). The results show that the implementation of political education at FISIP UMB takes place through two main pathways: academic and non-academic. Through the academic pathway, political education is delivered through coursework, scholarly discussions, and seminars that connect political theory with current socio-political conditions. Through the non-academic pathway, political education is realized through student organization activities such as BEM (the Student Executive Board) and DPM (the Student Representative Council), as well as cadre-development activities in IMM, which provide direct experience in democratic practice, such as deliberation, decision-making, and the expression of aspirations. When analyzed using Peter L. Berger's theory of social construction, the process by which students' democratic culture is formed occurs through three stages: externalization, objectivation, and internalization. Externalization is seen when democratic values are introduced through academic and organizational activities. Objectivation occurs when these values become habits and norms in students' lives on campus. Internalization, in turn, occurs when students absorb these democratic values into their self-awareness, thereby forming attitudes that are critical, participatory, and responsible. However, this research also identified several challenges in the implementation of political education, including a continued lack of interactive discussion in coursework, organizational dynamics sometimes influenced by personal ego, and uneven internalization of democratic values among students. Based on these findings, it can be concluded that political education at FISIP UMB plays an important role in building students' democratic culture. Therefore, there is a need to strengthen more participatory learning methods, as well as to develop discussion spaces and organizations capable of encouraging students to be more active, critical, and responsible in democratic life.

Keywords: political education, students, democratic culture, FISIP UMB

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Generasi muda memiliki posisi dan peran yang sangat vital dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Hal ini didasarkan pada peran pemuda seperti yang dimuat dalam UU RI No. 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan yang berbunyi pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. (Sanusi & Darmawan, 2016). Pada dasarnya, pendidikan politik merupakan pendidikan bagi Masyarakat untuk meningkatkan kesadaran bagaimana seharusnya berbangsa dan bernegara yang benar dan memberikan sumbangsih pemikiran untuk berperan aktif dalam Pembangunan.(Wawan Patriansyah et al., 2024)

Pendidikan adalah suatu upaya mengubah sikap dan perilaku sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan, yang pelaksanaannya harus dilakukan secara terorganisir, berencana dan berlangsung terus menerus kearah pembinaan manusia menjadi insan paripurna, dewasa dan berbudaya yang dilandasi oleh nilai-nilai budaya dan ideologi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Pendidikan harus dilakukan secara terus menerus, karena pendidikan bukanlah proses yang terjadi disekolah dan kampus saja, namun juga diluar sekolah dan kampus, yakni dilingkungan pekerjaan dan pemukiman termasuk didalamnya pada lingkungan keluarga. Politik berkenaan dengan negara, termasuk didalamnya soal kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan serta pendistribusian dan pengalokasian nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat (Prayugo & Prayitno, 2022).

Minimnya literasi politik, penyebaran informasi yang bias, serta rendahnya kesadaran kritis warga negara terhadap hak dan kewajiban politiknya menjadi

tantangan besar dalam proses konsolidasi demokrasi. Dalam konteks ini, pendidikan politik hadir sebagai instrumen penting untuk membentuk masyarakat yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari sistem demokrasi. Pendidikan politik tidak hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan tentang sistem pemerintahan, tetapi juga membentuk sikap toleran, menghargai perbedaan, serta mendorong keterlibatan aktif dalam proses politik secara damai dan konstruktif(Amanda et al., 2025).

Pendidikan politik merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan karakter mahasiswa sebagai agen perubahan sosial dan politik. Di Indonesia, kesadaran politik di kalangan mahasiswa masih beragam, meskipun mahasiswa dianggap sebagai kelompok yang memiliki peran signifikan dalam perkembangan demokrasi negara. FISIP UMB, sebagai salah satu fakultas yang mendalami ilmu sosial dan politik, memiliki potensi besar dalam mendidik mahasiswanya untuk menjadi warga negara yang aktif dan memiliki kesadaran politik yang tinggi. Namun, tantangan dalam mewujudkan budaya demokratis di kalangan mahasiswa FISIP UMB masih perlu diteliti lebih lanjut. Dengan mengimplementasikan pendidikan politik yang tepat, mahasiswa dapat dibimbing untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang demokrasi dan sistem politik yang berlaku. Politik dan pendidikan politik dan pendidikan saling terkait karena pendidikan merupakan instrumen yang kuat untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan nilai-nilai politik individu dan masyarakat. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk warga negara yang berpikiran kritis, memiliki pengetahuan politik yang memadai, dan

memahami sistem politik yang mereka jalani. Pendidikan politik juga berkontribusi pada partisipasi politik yang lebih aktif dan demokratis. Kekuasaan dalam pendidikan kekuasaan memainkan peran penting dalam pendidikan, karena kontrol atas pendidikan memberi pengaruh besar pada kepemilikan pengetahuan, nilai-nilai, dan pembentukan identitas.(Azmi et al., 2023). Penting untuk menegaskan bahwa pendidikan politik bukan sekadar wacana teoritis, melainkan sebuah kebutuhan mendesak dalam membentuk generasi muda yang sadar, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui pendidikan politik yang terarah dan kontekstual, khususnya di lingkungan akademik seperti FISIPOL UMB, mahasiswa dapat didorong untuk menjadi agen perubahan yang tidak hanya memahami dinamika politik, tetapi juga aktif berpartisipasi dalam membangun tatanan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan utama, seperti:

1. Bagaimana implementasi pendidikan politik di kalangan mahasiswa FISIPOL UMB?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam membangun budaya demokratis melalui pendidikan politik di FISIPOL UMB?
3. Bagaimana teori rekonstruksi sosial oleh Peter L. Berger dan teori struktural fungsional dari Robert K. Merton dapat diterapkan dalam konteks ini?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pendidikan politik yang diterapkan di FISIPOL UMB dapat

membantu mahasiswa memahami dan mengembangkan budaya demokratis. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedua teori tersebut dapat memberikan perspektif baru dalam pengembangan pendidikan politik di perguruan tinggi.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pendidikan politik di kalangan mahasiswa, serta meningkatkan pemahaman tentang pentingnya budaya demokratis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pihak kampus dalam merancang kurikulum pendidikan politik yang lebih efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Setelah melihat beberapa literatur yang ada di berbagai laman dan tempat dalam kajian pustaka ini penulis melihat ada beberapa penelitian serupa atau penelitian sebelumnya yang relevan dan dapat menjadi acuan peneliti untuk mengembangkan penelitian, antara lain :

1. Sanusi dan Darmawan (2016)
Penelitian yang dilakukan oleh Sanusi dan Darmawan berjudul "*Implementasi Pendidikan Politik dalam Membentuk Karakter Kepemimpinan Lintas Budaya pada Generasi Muda*". Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan objek organisasi kepemudaan, yaitu Gerakan Pemuda Ansor di Jawa Barat. Fokus utama penelitian ini adalah melihat bagaimana pendidikan politik dapat membentuk karakter kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila di kalangan pemuda.

2. Azmi et al. (2023)
Penelitian Azmi dan rekan-rekannya mengangkat topik "*Pendidikan Politik sebagai Sarana Mewujudkan Masyarakat Demokratis*". Studi ini dilakukan melalui analisis konseptual dan normatif, dengan mengkaji pentingnya pendidikan politik dalam membentuk masyarakat yang demokratis tanpa menitikberatkan pada kelompok sosial tertentu. Fokus dari penelitian ini adalah pada tingkat masyarakat secara umum, sehingga pendekatannya lebih bersifat makro. Dalam kajiannya, Azmi et al. tidak menggunakan teori sosiologi tertentu, melainkan lebih banyak mengacu pada prinsip-prinsip dasar demokrasi secara teoritis
3. Wawan Patriansyah et al. (2024)
Wawan Patriansyah dan tim melakukan penelitian berjudul "*Analisis Peran Pendidikan Politik dalam Membangun Kesadaran Mahasiswa Berpartisipasi dalam Pemilu Tahun 2024*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan fokus utamanya adalah menganalisis sejauh mana pendidikan politik mempengaruhi tingkat partisipasi mahasiswa dalam Pemilu.
4. Sukarno (2011)
Penelitian Sukarno berjudul "*Pendidikan Politik dalam Demokratisasi*", mengkaji pendidikan politik dari sudut pandang normatif dan filosofis. Fokus penelitian ini adalah pada pentingnya pendidikan politik sebagai alat untuk memperbaharui dan mendinamisir lembaga-lembaga demokrasi, tanpa mengambil studi kasus institusional tertentu. Sukarno menggunakan pendekatan yang bersifat umum dan filsafati terhadap konsep demokrasi, tanpa menggunakan teori sosiologi secara eksplisit. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada keyakinan bahwa pendidikan politik

merupakan sarana penting untuk membangun demokrasi yang lebih baik. Perbedaannya, Sukarno hanya membahas pada tataran konsep teoritis tanpa mengaitkan dengan studi kasus nyata, sedangkan penelitian ini mengkaji secara aplikatif bagaimana pendidikan politik diimplementasikan di FISIP UMB dan dianalisis menggunakan teori rekonstruksi sosial serta struktural fungsional.

2.2 Kerangka Konsep dan Landasan Teori

Penelitian ini berlandaskan pada pemahaman bahwa pendidikan politik memiliki peran krusial dalam membentuk budaya demokratis di kalangan mahasiswa. Pendidikan politik tidak hanya berfungsi untuk memberikan wawasan mengenai sistem politik, tetapi juga bertujuan untuk mengembangkan sikap kritis, nilai-nilai demokrasi, serta kemampuan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di FISIPOL UMB, pendidikan politik diimplementasikan melalui berbagai kegiatan akademik dan non-akademik yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan mahasiswa. Melalui interaksi sosial, diskusi, seminar, dan kurikulum yang mengintegrasikan aspek-aspek politik, diharapkan mahasiswa dapat merekonstruksi pemahaman mereka mengenai demokrasi dengan cara yang lebih mendalam dan aplikatif. Dalam kerangka konsep penelitian ini, pendidikan politik diposisikan sebagai variabel independen yang berpengaruh terhadap pembentukan budaya demokratis sebagai variabel dependen. Di sini, pendidikan politik terlihat sebagai proses sosialisasi nilai, sedangkan budaya demokratis tercermin dalam sikap kritis, penghargaan terhadap perbedaan, partisipasi aktif, dan tanggung jawab sosial mahasiswa.

2.2.1 Implementasi

Implementasi adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana terperinci untuk mencapai suatu tujuan. Proses implementasi dimulai setelah semua aspek perencanaan dianggap telah sempurna. Menurut teori Jones, implementasi merujuk pada "aktivitas yang diarahkan untuk mewujudkan sebuah program" (proses mewujudkan program hingga menghasilkan hasil yang terlihat). Dengan demikian, implementasi merupakan langkah yang diambil setelah suatu kebijakan ditetapkan, yang bertujuan agar kebijakan tersebut dapat mencapai target yang diinginkan. Nurdin Usman, dalam bukunya yang berjudul "Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum," memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengertian implementasi sebagai berikut: "Implementasi merupakan suatu proses yang berfokus pada aktivitas, aksi, tindakan, atau mekanisme dari suatu sistem. Lebih dari sekadar aktivitas, implementasi adalah kegiatan yang direncanakan dengan matang untuk mencapai tujuan tertentu."

Dengan demikian, pengertian implementasi di atas menggambarkan bahwa ia tidak hanya sekedar kegiatan, melainkan juga merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan dengan penuh keseriusan dan berlandaskan rencana yang telah disusun dengan baik. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh objek lain, yaitu pelaksanaan suatu program. (Anggraeni, 2019)

2.2.2 Pengertian Mahasiswa

Mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, atau

lembaga pendidikan lain yang setingkat. Istilah mahasiswa berasal dari dua kata, yaitu "maha" yang berarti lebih atau paling, dan "siswa" yang berarti pelajar. Mahasiswa biasanya berusia 18 hingga 25 tahun, yaitu masa akhir remaja dan awal dewasa. Di usia ini, mahasiswa dapat memantapkan pendirian hidupnya. (Hafizhuddin, 2019).

Pada umumnya, mahasiswa adalah seseorang yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi, termasuk universitas, sekolah tinggi, dan institusi akademik. Status sebagai mahasiswa diberikan kepada setiap orang yang sedang menempuh pendidikan tinggi, baik itu sarjana, magister, dan doktor. Walau keduanya sedang belajar, terdapat perbedaan status yang diberikan kepada orang-orang istimewa ini dibandingkan dengan siswa pada umumnya yang sedang mengikuti pendidikan di sekolah. Dengan menambahkan awalan 'maha' kepada kata 'mahasiswa', memberikan kesan yang mengesankan kepada setiap individu yang mendapat gelar tersebut (Cora, D. I., Engka, J. N., & Pangemanan, D, 2019).

2.2.3 Pendidikan Politik

1. Pengertian Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran individu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara, sekaligus membentuk sikap politik yang aktif dan kritis (Wawan Patriansyah et al. , 2024). Pendidikan ini tidak hanya mencakup pemahaman tentang sistem politik dan pemerintahan, tetapi juga merangkum nilai-nilai demokrasi, etika politik, serta tanggung jawab sosial. Bagi mahasiswa, pendidikan politik berperan penting sebagai sarana untuk

menanamkan kesadaran berpolitik sejak dini.

2. Tujuan Pendidikan Politik

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 31 mengenai Partai Politik, dijelaskan bahwa partai politik memiliki tujuan penting dalam mengedukasi masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut meliputi:

a.

2.2.3 Demokrasi

Demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos-cratein atau demos-cratos adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.

2.2.4 Landasan Teori

Teori Peter L. Berger

Peter L. Berger bersama Thomas Luckmann dalam karya klasiknya *"The Social Construction of Reality"* (1966) mengemukakan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang hadir secara alami, melainkan dibentuk melalui proses interaksi sosial. Menurut Berger, kehidupan sosial manusia adalah produk dari konstruksi yang dilakukan secara terus-menerus melalui tiga tahapan utama, yaitu: **eksternalisasi**, **obyektivasi**, dan **internalisasi**.

Eksternalisasi adalah proses di mana individu mengekspresikan diri ke dunia luar dalam bentuk aktivitas sosial, nilai, norma, dan institusi.

1. **Objektivasi** terjadi ketika hasil-hasil eksternalisasi tersebut menjadi realitas yang dianggap objektif, di luar individu, dan mengikat bagi masyarakat.
2. **Internalisasi** adalah tahap di mana individu mengambil kembali realitas sosial tersebut ke dalam kesadaran pribadinya, menjadikannya sebagai bagian dari identitas dan perilakunya.

Dalam pandangan Berger, pendidikan – termasuk pendidikan politik – adalah salah satu sarana penting dalam proses konstruksi sosial ini. Melalui pendidikan, individu diajarkan nilai, norma, dan pemahaman tertentu tentang dunia sosial dan politik, yang kemudian diinternalisasi menjadi bagian dari identitas mereka.

2.2.5 Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir adalah alur pikir peneliti sebagai dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat sub fokus yang menjadi latar belakang dari penelitian ini. Didalam penelitian kualitatif, dibutuhkan sebuah landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu dibutuhkan kerangka pemikiran untuk mengembangkan konteks dan konsep penelitian lebih lanjut sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi, serta penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan menggabungkan antara teori dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka penelitian teoritis atas akan peneliti tuangkan dalam kerangka

konseptual sesuai dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti yaitu Implementasi Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa Fisipol Umb Guna Membangun Budaya Demokratis.

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan diteliti dan diamati oleh penulis adalah Kawasan universitas Muhammadiyah Bengkulu tepatnya di Kampus 4 Seputaran Gedung Ahmad Dahlan (AD). Dimana lokasi yang dipilih dirasa strategis dan cocok dengan penelitian yang akan dilakukan yang memang dikhususkan untuk menjangkau mahasiswa aktif yang ada diperguruan tinggi tepatnya mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Adapun data pendukung adalah sampel penelitian ini mencakup beberapa elemen mahasiswa baik yang aktif di ruang pembelajaran (kelas), organisasi mahasiswa (ORMAWA) dan organisasi kepemudaan internal Muhammadiyah (IMM).

3.2 Jenis dan Pendekatan Peneliian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya memaparkan suatu gejala, tidak dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh tetapi lebih menggambarkan suatu variabel. Penelitian ini untuk menggambarkan kondisi atau fakta temuan yang terjadi secara alamiah dengan analisis lebih mendalam mengenai analisis Implementasi Pendidikan politik dalam membangun budaya demokratis itu sendiri. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri,

baik satu variabel atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lain (Arif Rachman 2023) selanjutnya dia mengatakan bahwa data kualitatif ialah data yang berbentuk kata, kalimat, skema dan gambar. Berikut ini desain penelitian yang telah penulis pilih untuk bisa mengkaji lebih dalam bagaimana analisis Implementasi Pendidikan Politik Bagi Mahasiswa FISIP MB

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana yang tidak relevan (Moleong, 2010) pembatasan dalam penelitian kualitatif ini lebih didasarkan pada tingkat kepentingan/urgensi dari masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada beberapa aspek dalam penelitian ini.

3.4 Sumber Data

1. Data Primer

S. Nasution (2017) berpendapat bahwa data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Sedangkan menurut Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data yang diperoleh dari lapangan dengan mengamati atau mewawancarai. Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi langsung tentang implementasi Pendidikan politik dalam membangun budaya demokratis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya. Data sekunder juga dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, lampiran-lampiran dari badan-badan resmi seperti kementerian-kementerian, hasil-hasil studi, tesis, hasil survey, studi histories, dan sebagainya

3.5 Penentuan Informasi Informan Penelitian

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ini adalah teknik mengambil informan dengan tujuan tertentu, serta berbagai pertimbangan sesuai dengan tema penelitian karena orang tersebut dianggap memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Dalam hal ini peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui permasalahan yang akan dikaji serta memberikan informasi yang dapat dikembangkan untuk memperoleh data dalam penelitian kualitatif yaitu :

1. Mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang ada diperguruan tinggi
2. Mahasiswa yang Aktif di Organisasi Mahasiswa (Ormawa)
3. Mahasiswa yang Aktif di Organisasi kepemudaan di internal Muhammadiyah (IMM)

Kriteria diatas dipilih sebagai kriteria informan yang diwawancarai agar data wawancara yang didapat lebih valid. Selain itu, informan juga telah dipastikan bersedia diwawancarai dan memberikan informasi yang akurat agar penelitian dapat lebih akurat serta kredibilitasnya terjamin.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data-data keperluan penelitian. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

1. Teknik Observasi

Pengamatan atau observasi dilakukan dalam suatu penelitian ilmiah untuk mencari fakta maupun data-data yang diperlukan bagi suatu penelitian ilmiah dalam wilayah penelitian. Pengamatan ini digunakan peneliti dalam rangka melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada suatu keadaan yang sebenarnya. Dalam observasi ini, peneliti menggunakan alat observasi berupa catatan lapangan dan pedoman observasi.

2. Teknik Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2021:186). Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam agar proses komunikasi dan interaksi dalam pengumpulan data dapat terarah. Data primer (untuk menjawab pertanyaan) dalam penelitian ini berupa kata-kata, informasi, ungkapan dan tanggapan informan dalam penelitian tentang Implementasi Pendidikan Politik dalam

Membangun Budaya Demokratis Pendekatan yang digunakan adalah wawancara dengan menggunakan bantuan Pedoman Wawancara dan Spontanitas wawancara. Pedoman wawancara yang akan di gunakan sebagai panduan wawancara lalu dilampirkan pada bagian akhir desain penelitian ini.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah melakukan telaah pada dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dimaksud adalah data yang diperlukan sebagai data pendukung, dimana peneliti dapat mengumpulkan data, laporan dan dokumen resmi dari lokasi penelitian. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa profil serta photo-photo dokumentasi saat peneliti melaksanakan penelitian wawancara dan observasi di Fakultas Ilmu Sosial Politik UMB.

3.7 Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data di perlukan dalam penelitian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepercayaan data. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan beberapa kriteria yang meliputi kredibilitas, kepastian dan kebergantungan. Pengamatan keabsahan data dapat di adakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan isu yang sedang dicari.

3.8 Analisis Data

Alur yang digunakan dalam penyajian data dalam penelitian ini mengadopsi konsep Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:191) Analisis data dalam penelitian ini berlangsung bersama dengan proses pengumpulan data dalam periode tertentu. Mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data ada 3 yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Tempat Penelitian

1. FISIP UMB

FISIP UMB memiliki peran yang penting dalam FISIPOL UMB (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu) adalah fakultas yang fokus pada pengajaran dan penelitian di bidang ilmu sosial dan politik. Fakultas ini memiliki berbagai program studi yang berorientasi pada pengembangan pemahaman mahasiswa mengenai isu-isu sosial dan politik, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi profesional di berbagai bidang terkait. Dalam konteks pendidikan politik, FISIPOL UMB memiliki peran penting untuk menghasilkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memahami dinamika politik serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik.

2. Ormawa FISIP

Dalam penelitian ini, peneliti juga memilih ruang organisasi mahasiswa sebagai objektifikasi penelitian dimana mahasiswa

yang terlibat ormawa memang memiliki dorongan lebih dalam berpartisipasi dalam internal akademik selain dari proses pembelajaran adapun disini aspek yang dipilih oleh peneliti yakni :

No.	Keterangan	sasaran
1.	Badan Eksekutif Mahasiswa Fisipol UMB	Mahasiswa aktif di semester 2,4,6 dan 8
2.	Dewan Perwakilan Mahasiswa Fisipol UMB	Mahasiswa aktif di semester 2,4,6 dan 8

3. Organisasi kepemudaan Internal Muhammadiyah

Adapun terakhir peneliti juga melibatkan mahasiswa yang tergolong produktif pada keikutsertaan dalam organisasi kepemudaan yang ada di internal muhammadiyah yakni sebuah organisasi otonom yang berada di bawah naungan langsung muhammadiyah yaitu organisasi IMM.

4. Profil Informan

Adapun Informan dalam Penelitian ini dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 4.1 Informan

No.	Nama (Inisial)
	AP
	ADH
	MAF
	IA
	TQ
	RS

4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara mendalam dengan enam informan yang terdiri dari mahasiswa FISIPOL, pengurus ORMAWA, dan kader IMM, diperoleh data sebagai berikut:

1. Mahasiswa FISIP (Ruang Perkuliahan) Informan 1 (AP, mahasiswa Sosiologi semester 5):

“Kalau di kelas, pendidikan politik itu terasa ketika dosen sering mengaitkan teori dengan kondisi politik sekarang. Misalnya saat membahas teori demokrasi, dosen mencontohkan langsung dengan isu pemilu atau kebijakan pemerintah terbaru. Dari situ kami jadi lebih paham bahwa demokrasi itu bukan sekadar teori, tapi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.”

Informan 2 (IA, mahasiswa Sosiologi semester 7):

“Menurut saya implementasi pendidikan politik di ruang kuliah memang membantu membuka pola pikir. Tapi kadang masih kurang diskusi terbuka. Mahasiswa cenderung diam, padahal topik yang dibahas relevan dengan kondisi politik di luar kampus. Jadi perlu metode belajar yang lebih interaktif.”

Analisis:

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa FISIP merasakan manfaat pendidikan politik dalam perkuliahan, terutama dalam mengaitkan teori dengan realitas. Namun, tantangan muncul pada kurangnya ruang diskusi interaktif sehingga partisipasi kritis belum maksimal.

2. Mahasiswa ORMAWA (BEM & DPM FISIP)

Informan 3 (ADH, pengurus BEM FISIP):

“Bagi kami di BEM, pendidikan politik itu tidak hanya di kelas, tapi juga lewat

organisasi. Misalnya saat menyusun program kerja, kami belajar bagaimana menyerap aspirasi mahasiswa dan membuat keputusan secara musyawarah. Itu bagian dari latihan demokrasi nyata.”

Informan 4 (RS, anggota DPM FISIPOL):

“Saya melihat organisasi menjadi ruang belajar politik yang lebih praktis. Disini kita berlatih berdebat, voting, bahkan berbeda pendapat dengan sehat. Itu implementasi langsung dari nilai demokrasi. Hanya saja kadang ego pribadi masih muncul, jadi prosesnya belum sepenuhnya ideal.”

Analisis:

Dari sisi ORMAWA, implementasi pendidikan politik lebih tampak dalam praktik kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta dinamika organisasi. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa budaya demokratis dibangun melalui pengalaman langsung, bukan hanya teori.

3. Kader IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)

Informan 5 (MAF, kader IMM semester 7):

“IMM memberi ruang lebih luas untuk pendidikan politik yang berlandaskan nilai Islam dan Pancasila. Misalnya dalam kajian rutin, kami diajak melihat politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, tapi sebagai jalan pengabdian. Itu membentuk kesadaran bahwa demokrasi harus bernilai moral.”

Informan 6 (TQ, kader IMM semester 8):

“Bagi saya, IMM adalah tempat yang mengajarkan pentingnya keberanian bersuara. Implementasi pendidikan politik di IMM membuat kami terbiasa kritis

terhadap kebijakan kampus maupun isu nasional. Jadi, budaya demokratis itu terbangun lewat sikap aktif dan tanggung jawab sosial.”

Analisis:

Perspektif kader IMM menekankan aspek nilai dan moral dalam pendidikan politik. Implementasi pendidikan politik dipahami bukan hanya teknis organisasi, tetapi juga ideologis—yakni membentuk kader yang kritis sekaligus berakhlak.

Dari ketiga elemen mahasiswa dapat disimpulkan bahwa implementasi pendidikan politik:

1. **Di ruang kuliah** → lebih bersifat teoritis, namun membantu menambah wawasan dasar demokrasi.
2. **Di ORMAWA** → menjadi praktik langsung demokrasi dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.
3. **Di IMM** → menekankan pembentukan nilai moral dan sikap kritis berbasis ideologi.

Secara keseluruhan, pendidikan politik di FISIPOL UMB berkontribusi pada pembentukan budaya demokratis mahasiswa, meskipun masih ada tantangan berupa kurangnya diskusi interaktif, ego organisasi, dan konsistensi internalisasi nilai.

Pendidikan politik di FISIP UMB diimplementasikan melalui dua jalur utama, yaitu **jalur akademik** (mata kuliah, seminar, diskusi ilmiah) dan **jalur non-akademik** (organisasi mahasiswa serta kaderisasi IMM). Melalui jalur akademik, mahasiswa diperkenalkan pada konsep-konsep politik, demokrasi, dan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia. Dosen sering mengaitkan teori dengan kondisi aktual sehingga mahasiswa dapat

memahami relevansi ilmu politik dengan kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, jalur non-akademik memberi kesempatan mahasiswa untuk mempraktikkan nilai-nilai demokratis secara langsung. ORMAWA menjadi wadah latihan kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan penyampaian aspirasi. IMM menambahkan dimensi ideologis dan moral, menjadikan politik bukan hanya teknis kekuasaan, tetapi juga sarana pengabdian yang bernilai etis.

Pembahasan pada penelitian ini mengintegrasikan temuan lapangan melalui wawancara dengan enam informan yang mewakili tiga elemen mahasiswa (mahasiswa FISIP, pengurus ORMAWA, dan kader IMM) dengan teori **konstruksi sosial Peter L. Berger**. Teori ini menjelaskan bahwa realitas sosial dibentuk melalui proses **eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi**, yang berlangsung secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks penelitian ini, realitas yang dibangun adalah **budaya demokratis mahasiswa FISIPOL UMB melalui implementasi pendidikan politik**.

1. Eksternalisasi: Pendidikan Politik sebagai Ekspresi Nilai Demokrasi

Tahap eksternalisasi merupakan proses di mana individu atau institusi mengekspresikan gagasan, nilai, dan pengetahuan ke dalam dunia sosial. Berdasarkan temuan penelitian, dosen, kurikulum, serta kegiatan akademik di FISIPOL menjadi sarana eksternalisasi nilai-nilai demokratis. Hal ini tampak dari pernyataan **AP** yang menyebutkan bahwa dosen sering menghubungkan teori demokrasi dengan isu aktual, sehingga mahasiswa memahami demokrasi bukan sekadar konsep abstrak.

Selain itu, pada ranah ORMAWA, eksternalisasi terlihat dalam praktik organisasi mahasiswa, seperti musyawarah, debat, hingga voting, sebagaimana disampaikan oleh **MAF**. Sementara pada IMM, eksternalisasi terjadi dalam bentuk kajian ideologis yang memaknai politik sebagai sarana pengabdian, bukan sekadar perebutan kekuasaan (**TQ**).

Dengan demikian, eksternalisasi pendidikan politik di FISIPOL UMB berlangsung dalam tiga ruang utama: ruang akademik (kelas), ruang organisasi mahasiswa (ORMAWA), dan ruang kaderisasi ideologis (IMM).

2. Objektivasi: Pendidikan Politik Menjadi Kenyataan Sosial

Tahap objektivasi adalah saat hasil eksternalisasi menjadi realitas sosial yang diakui bersama dan dianggap “seharusnya” ada. Temuan penelitian menunjukkan bahwa nilai demokrasi telah melembaga dalam kehidupan kampus.

Mahasiswa FISIP melihat perkuliahan politik sebagai forum wajar untuk menumbuhkan sikap kritis (**ADH**). Bagi ORMAWA, mekanisme demokratis seperti rapat, musyawarah, dan voting menjadi kebiasaan organisasi yang tidak lagi dipertanyakan (**IA**). Sementara di IMM, tradisi berdiskusi kritis, menyuarakan aspirasi, dan membangun kesadaran moral dianggap sebagai kewajiban kader.

Objektivasi ini menunjukkan bahwa pendidikan politik di FISIPOL tidak hanya dipahami sebagai instruksi formal, tetapi telah berubah menjadi praktik sosial yang mengikat mahasiswa. Demokrasi menjadi norma bersama yang tercermin dalam pola interaksi, baik dalam diskusi

kelas, dinamika organisasi, maupun kegiatan kaderisasi.

3. Internalisasi: Nilai Demokrasi Menjadi Bagian Identitas Mahasiswa

Tahap internalisasi adalah saat individu menyerap realitas sosial ke dalam kesadaran pribadinya. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa mahasiswa mulai membangun identitas diri yang demokratis:

- 1) Mahasiswa FISIP merasa lebih kritis dalam melihat isu politik dan lebih terbuka terhadap perbedaan pendapat.
- 2) Mahasiswa ORMAWA belajar bertanggung jawab, berani menyampaikan pendapat, sekaligus menghargai hasil keputusan kolektif.
- 3) Kader IMM menginternalisasi nilai demokrasi dengan basis moral dan ideologi, sehingga terbentuk kesadaran politik yang lebih mendalam dan religius.

Dengan demikian, internalisasi pendidikan politik di FISIPOL UMB tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga **sikap dan identitas demokratis** mahasiswa, yang kemudian memengaruhi cara mereka berinteraksi di dalam maupun di luar kampus.

4. Komparasi Hasil Penelitian dan Teori Konstruksi Sosial Berger

Jika dibandingkan dengan teori Berger, maka hasil penelitian ini menunjukkan kesesuaian yang kuat:

- **Eksternalisasi:** Pendidikan politik diekspresikan melalui kegiatan perkuliahan, organisasi, dan kaderisasi.
- **Objektivasi:** Kegiatan tersebut menjadi realitas bersama yang diterima mahasiswa sebagai norma demokrasi kampus.

- **Internalisasi:** Mahasiswa menyerap nilai-nilai tersebut ke dalam identitas mereka, sehingga terbentuk sikap kritis, partisipatif, dan berorientasi pada nilai moral.

Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan dalam setiap tahap. Pada eksternalisasi, kendala muncul dalam bentuk metode perkuliahan yang masih pasif. Pada objektivasi, dinamika organisasi kadang masih dipengaruhi ego personal. Pada internalisasi, tidak semua mahasiswa mampu konsisten mengimplementasikan nilai demokrasi di luar ruang kampus.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan politik di FISIPOL UMB memang sejalan dengan teori konstruksi sosial Berger. Pendidikan politik tidak berhenti pada transfer pengetahuan, melainkan membentuk realitas sosial yang dialami mahasiswa sehari-hari. Proses ini pada akhirnya menghasilkan **budaya demokratis** yang berkembang secara alami di kalangan mahasiswa, meskipun masih memerlukan penguatan agar internalisasi nilai demokrasi dapat lebih menyeluruh.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian mengenai implementasi pendidikan politik dalam membangun budaya demokratis di FISIPOL Universitas Muhammadiyah Bengkulu menghasilkan beberapa temuan penting. Pendidikan politik di lingkungan kampus ini dilaksanakan melalui dua jalur utama, yaitu jalur akademik dan non-akademik. Jalur akademik berjalan melalui mata kuliah, diskusi ilmiah, dan seminar yang menekankan penguasaan teori politik

sekaligus mengaitkannya dengan isu-isu aktual, sehingga mahasiswa dapat memahami bahwa politik dan demokrasi bukan hanya konsep abstrak melainkan realitas yang hadir dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jalur non-akademik berlangsung melalui kegiatan organisasi mahasiswa (ORMAWA) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang memberikan pengalaman langsung dalam mempraktikkan nilai-nilai demokratis. Melalui organisasi, mahasiswa terbiasa bermusyawarah, melakukan voting, dan mengelola aspirasi, sedangkan IMM memperkuat dimensi ideologis dan moral dengan menekankan politik sebagai sarana pengabdian, kritik sosial, dan pengembangan sikap beretika.

Dalam kaitannya dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa proses demokratisasi di FISIPOL UMB terbentuk melalui tiga tahapan utama. Pertama, eksternalisasi, ketika dosen, organisasi, dan IMM mengekspresikan nilai-nilai demokrasi ke dalam ruang akademik maupun forum non-akademik. Kedua, objektivasi, ketika ekspresi tersebut melembaga menjadi kebiasaan dan norma dalam kehidupan mahasiswa, seperti budaya diskusi di kelas, mekanisme musyawarah dalam organisasi, dan forum kajian ideologis di IMM. Ketiga, internalisasi, ketika mahasiswa menyerap nilai demokrasi ke dalam kesadaran diri, sehingga terbentuk identitas pribadi yang lebih kritis, partisipatif, dan berlandaskan etika. Dengan demikian, pendidikan politik di FISIPOL UMB tidak hanya sekadar mentransfer pengetahuan, melainkan juga mengonstruksi realitas sosial yang melahirkan budaya demokratis di kalangan mahasiswa.

Meski demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah tantangan. Di ruang perkuliahan, diskusi masih cenderung pasif sehingga mahasiswa belum optimal mengekspresikan sikap kritis. Dalam organisasi mahasiswa, dinamika demokrasi kadang terhambat oleh ego personal dan kepentingan kelompok. Sementara di IMM, meskipun nilai moral dan ideologi ditekankan, konsistensi kader dalam menjaga prinsip demokratis ketika terjun pada ranah politik praktis sering kali menjadi ujian tersendiri.

Saran

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran. Pihak fakultas diharapkan dapat meningkatkan metode pembelajaran interaktif agar mahasiswa lebih berani berdiskusi dan berargumentasi. Organisasi mahasiswa perlu memperkuat praktik demokrasi yang sehat dengan menekankan musyawarah dan transparansi, sementara IMM diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara sikap kritis dan landasan moral agar nilai demokrasi tidak terjebak pada kepentingan praktis semata. Mahasiswa secara umum didorong untuk lebih aktif berpartisipasi dalam forum akademik maupun organisasi serta mengimplementasikan nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di kampus tetapi juga di masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan dengan pendekatan yang lebih beragam, misalnya kuantitatif atau metode campuran, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas dan komprehensif tentang efektivitas pendidikan politik dalam membangun budaya demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianda, A. (2023). Peran Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Semangat Demokrasi Generasi Muda di Kabupaten Belitung Timur. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(9), 325–332. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i9.2049>
- Amanda, T., Novrizza, H., & Dhewantoro, S. (2025). Pendidikan Politik sebagai Fondasi Demokrasi dalam Kehidupan Masyarakat Multikultural. *Jurnal Governance and Politics (JPG)*, 5(1), 7–14.
- Anggraeni, I. (2019). Pengertian Implementasi dan PendapaT Ahli. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 16–36.
- Azmi, L., Batubara, S. M., & Hati, C. (2023). Implementasi Pendidikan Politik Bagi Warga Negara Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Demokratis. *Jurnal Media Ilmu*, 2(2), 173–186.
- Hafizhuddin, M. I. (2019). Hubungan Antara Self Disclousure Melalui Status Wa Dan Kualitas Hidup Pada Mahasiswa Di Universitas Muhammadiyah Surabaya. *Skip*, h. 2.
- Handoyo, Eko & Lestari, P. (2017). *Eko Handoyo dan Puji Lestari, Pendidikan Politik*. 16–52.
- Prayugo, A., & Prayitno, R. B. P. (2022). Pendidikan Politik Sebagai Proses Belajar Membentuk Kesadaran Politik dan Peran Kewarganegaraan. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 3(3), 427–442. <https://doi.org/10.62775/edukasia.v3i3.138>
- Sanusi, A. R., & Darmawan, C. (2016). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM MEMBENTUK KARAKTER KEPEMIMPINAN LINTAS BUDAYA PADA GENERASI MUDA DEMI MEWUJUDKAN BUDAYA POLITIK PANCASILA (Studi Deskriptif terhadap Organisasi Kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor Jawa Barat). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 24. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i1.3668>
- Sukarno, B. (2011). Pendidikan Politik Dalam Demokratisasi. *Widya Wacana: Jurnal Ilmiah*, 7(1), 1–19.
- Sulisworo, D., Wahyuningsih, T., & Arif, D. B. (2016). Demokrasi (Bahan Ajar). *Demokrasi (Hibah Materi Pembelajaran Konvensional)*, 177–201.
- Wawan Patriansyah, Nursiah Hasibuan, Muallim Hasibuan, & Tri Eva Juniasih. (2024). Analisis Peran Pendidikan Politik Dalam Membangun Kesadaran Mahasiswa Berpartisipasi Dalam Pemilu Tahun 2024. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(2), 40–49. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i2.56>